
EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TELAHAH TENTANG AKSESIBILITAS, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI WILAYAH URBAN FRINGE HARJAMUKTI, CIREBON

Fitroh Uriyalita¹, Jamali Syahrodi², Sumanta³

¹Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, fithrohuriyalita@gmail.com

²Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, sahodijamali@gmail.com

³ Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, sumanta.hasyim@gmail.com

Citation : Uriyalita, F., Syahrodi, J., Sumantra. (2020). Evaluasi Program Indonesia Pintar (Pip) Telaah Tentang Aksesibilitas, Pencegahan Dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah Di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon. *Edum Journal*, 3(2), 179-199

ABSTRAK

Meskipun termasuk salah satu kawasan yang tergabung dalam mega proyek Metropolitan Cirebon Raya (MCR), Kecamatan Harjamukti tetap memiliki pekerjaan rumah untuk mengentaskan angka putus sekolah yang tinggi, terutama di wilayah pinggiran kota (*urban fringe*) bersama permasalahan multidimensi yang menyertai di dalamnya. Mulai dari rendahnya kesadaran akan arti pentingnya pendidikan, ekonomi, doktrin pemimpin kharismatik, sampai dengan kasus perundungan antarsiswa yang ditemukan di sana. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif model evaluasi bebas tujuan (*goal free evaluation*) ini menggambarkan hasil evaluasi program serta menganalisis dampaknya secara integratif. Hasil telaah tim penelitian adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikelola di wilayah *urban fringe* Kecamatan Harjamukti ini mampu memperluas akses pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah dan mengakomodir kebutuhan bagi anak-anak yang terlanjur sudah putus sekolah. Sehingga keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat terutama dalam menjalankan aktivitas berdaya melalui empat pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) di Kecamatan Harjamukti.

Kata Kunci : Evaluasi Program Indonesia Pintar, anak putus sekolah, *urbanfringe*, PKBM.

ABSTRACT

Even though it is one of the areas that are part of the Metropolitan Cirebon Raya (MCR) mega project, Harjamukti Subdistrict still has homework to alleviate the high dropout rate, especially in the suburban area (urban fringe) along with the multidimensional problems that accompany it. Starting from the low awareness of the importance of education, economics, the doctrine of charismatic leaders, to cases of bullying between students found there. Research using qualitative research methods of objective-free evaluation (objective-free evaluation) which describes the results of program evaluation and its impact in an integrated manner. The result of the research team's analysis is that the Smart Indonesia Program (PIP), which is managed in the suburbs of Harjamukti District, is able to expand access to proper education, prevent children from dropping out of school and accommodate the needs of children who have already dropped out of school. So that the interaction between the government, the private sector and the community, especially in carrying out empowered activities through four teaching and learning activity centers (PKBM) in Harjamukti District.

Keyword(s): *Evaluation of the Smart Indonesia Program, children dropping out of school, urban fringe, PKBM*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses penting untuk memperoleh keterampilan dasar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher-order skill*) di seluruh tingkat pendidikan dan perkembangan, akses yang lebih besar dan adil kepada pendidikan berkualitas di seluruh tingkatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasi, pengetahuan, keterampilan dan nilai yang diperlukan untuk dapat berfungsi dengan baik dan berkontribusi kepada masyarakat. Karena itulah, diperlukan seperangkat kebijakan yang mendukung kesamaan hak untuk mengakses pendidikan, kerangka dan program kerja operasional yang sistematis, pro terhadap kepentingan umum serta adaptif terhadap perubahan-perubahan sosial, ekonomi maupun budaya yang mempengaruhinya.

Masalah-masalah multidimensional yang memperkeruh pengembangan kualitas maupun kuantitas pendidikan di Indonesia, tak jauh-jauh dari kurangnya kesadaran akan arti pentingnya pendidikan, kurangnya partisipasi masyarakat, ketimpangan akses di wilayah pinggiran, kesenjangan kelas sosial ekonomi, sarana, prasarana, sumber daya manusia, finansial dan masalah

lainnya tetap terjadi. Bahkan diperburuk lagi dengan munculnya kasus korupsi anggaran pendidikan.

Sementara itu, realitasnya, tidak sedikit dijumpai anak-anak usia sekolah yang justru sibuk bekerja mencari nafkah di sepanjang jalan raya. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian beralih aktivitasnya menjadi pengamen, pengemis, penjual aksesoris-aksesoris kendaraan roda empat, menjual makanan ataupun minuman dan yang lainnya. Dimana keadaan ini sangat berbanding terbalik dengan anak-anak dari kelas menengah ke atas yang asik berburu masuk ke sekolah favorit, bergensi sekaligus juga mahal. Masalah-masalah yang mewarnai dunia pendidikan seperti ini, sudah seharusnya diatasi secara sinergis dan menyeluruh. Sehingga, pendidikan bagi semua (*education for all*) benar-benar bisa diciptakan sekaligus juga menekan angka putus sekolah dan mendorong peningkatan kualitas serta kuantitas bidang pendidikan.

Salah satu program pendidikan yang dirilis pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk menekan angka putus sekolah adalah Program Indonesia Pintar yang sebenarnya sudah mengalami berkali-kali transformasi pada program

yang sebelumnya sudah berjalan dan disempurnakan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM), Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Keluarga Sejahtera. Program Indonesia Pintar ini digadang-gadang sebagai program unggulan yang melibatkan tiga kementerian sekaligus yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama.

Lahirnya kebijakan yang ditandai dengan munculnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 ini menjelaskan tentang tujuan program yang diberlakukan bagi anak-anak usia 6 sampai dengan 21 tahun agar bisa *pertama*, mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 Tahun. *Kedua*, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*Drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. *Ketiga*, menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya atau balai latihan kerja.

Lebih lanjut, melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014,

diamanatkan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Dana PIP ini nantinya akan dicairkan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran. Dimana bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A sebesar Rp225.000,-/semester (Rp450.000,-/tahun), untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B sebesar Rp375.000,-/semester (Rp750.000,-/tahun), dan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Paket C sebesar Rp500.000,-/semester (Rp1.000.000,-/tahun), serta Rp1.000.000,- untuk Peserta Kursus selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun. Tujuan dari program PIP dan KIP adalah membantu siswa kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka (Rohaeni, N. E, Saryono, O, (2018).

Selain diperuntukkan bagi peserta didik di lembaga formal, PIP ini juga

menyasar siswa-siswa di lembaga nonformal yang memiliki jenjang pendidikan setara dengan sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas dalam format pendidikan kesetaraan Paket A/B/C yang dipusatkan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan juga Peserta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). PIP juga dapat digunakan untuk mengikuti program yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kemsenterian Ketenagakerjaan

Sebagaimana wilayah lainnya, Kecamatan Harjamukti juga sudah melaksanakan PIP ini sejak 2016 lalu, yang idealnya program ini sudah mampu mengatasi anak putus sekolah di sana. Tapi pada kenyataannya, kecamatan yang termasuk ke dalam proyek Metropolitan Cirebon Raya (MCR) yang bervisi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendalaman agama serta pendidikan di tahun 2018-20223 secara lebih baik ini justru memiliki angka putus sekolah tertinggi sewilayah Kota Cirebon. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Tabel persentase penduduk usia 7-14 tahun ke atas menurut karakteristik dan status pendidikan.

| | Tidak/ belum | Masih Sekolah | | | Tidak sekolah lagi |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | SD/ Sederaja t | SMP/ Seder ajat | SMA/ Seder ajat | |
| L | 0,46 | 31,5 | 16,41 | 18,55 | 33,08 |
| P | 0 | 32,41 | 13,43 | 19,27 | 34,89 |

Sumber: katalog 4101002.3274 statistik kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon 2018.

Keterangan:

L : Laki-Laki

P : Perempuan

Berdasarkan data di atas, anak-anak yang tidak bersekolah lagi termasuk sebanyak 33,08 persen untuk laki-laki dan 34,89 persen untuk perempuan. Jika dikalkulasikan dari jumlah keduanya, maka akan didapati angka yang cukup besar yaitu sekitar 67,97 persen. Selain itu, berdasarkan data statistik 2017, anak-

anak putus sekolah di Kecamatan Harjamukti tertinggi yaitu berjumlah 15 orang anak; kelas 1 ada 5 orang, kelas 2 ada 3, kelas 3 ada 3, kelas 5 ada 1, dan kelas 6 ada 3. Dari 15 orang anak tersebut, enam di antaranya adalah laki-laki dan sisanya adalah siswa perempuan. Padahal di sisi lain, jumlah persentase penduduk usia sekolah yang berusia 0-14 tahun, ada sekitar 24,6% dan kelompok usia 15-64 tahun berjumlah sekitar 70,1%.

Data-data di atas menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya anak-anak usia sekolah yang justru tidak bersekolah lagi. Tentu saja, hal ini sangat memprihatinkan mengingat program unggulan seperti PIP disebut-sebut bisa menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak miskin dan rentan putus sekolah. Karena itulah, diperlukan sebuah kajian yang komprehensif terkait dengan evaluasi program yang nantinya diharapkan mampu merumuskan metode dan hasil dari evaluasi Program Indonesia Pintar yang akan dilakukan melalui pengukuran tingkat keberhasilan dan kelemahan proses pendidikan yang sudah berjalan dari berbagai aspek yang berkaitan. Dimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), evaluasi bisa saja dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di antaranya terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif karena prosedur penelitiannya

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk dapat mengumpulkan, menyusun serta menganalisis hasil penelitian yang dibahas (Megawati, I, 2016). Menurut David Williams, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah, yang dengan sengaja dirancang untuk mengetahui derajat tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Karena itu, penelitian ini tetap perlu memperhatikan beberapa elemen yang terlibat di dalamnya seperti fokus evaluasi, desain evaluasi, pengumpulan informasi, analisis dan interpretasi, penyusunan laporan, pengelolaan dan evaluasi untuk evaluasi (Brikerhoff, 1986:ix).

Penelitian ini kemudian akan dikembangkan berdasarkan model Scriven tentang *goal free evaluation approach* atau pendekatan evaluasi bebas tujuan, yang menurut Kifer bahkan disebut-sebut sebagai kajian semua dampak atau hasil akhir secara integratif. Model *goal free* juga perlu memperhatikan soal keberadaan program apakah bermanfaat ataukah tidak atas

dasar penilaian kebutuhan yang ada di wilayah *urban fringe* Kecamatan Harjamukti.

Dalam model *goal free* ini, penulis tidak hanya perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan Program Indonesia Pintar, tapi juga perlu memperhatikan bagaimana kinerja program dengan cara mengidentifikasi pengaruh-pengaruh yang terjadi baik yang bersifat positif maupun negatif. Fokus model ini terletak pada bagaimana seorang evaluator memperhatikan perubahan perilaku yang terjadi sebagai bagian dari dampak program yang diimplementasikan, memperhatikan efek sampingnya dan membandingkannya sebelum program dilaksanakan. Selain itu, model ini juga mengkaji perihal besaran biaya yang dikeluarkan oleh program tersebut (*cost benefit analysis*).

Lebih jauh, menurut Scriven, evaluasi program berbasis *goal free* ini perlu dilakukan melalui interpretasi penilaian ataupun eksplanasi yang memungkinkan hasil penelitian ini untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan sekaligus juga menyediakan informasi yang dibutuhkan. Agar bisa menghasilkan evaluasi terhadap dampak yang sebelumnya tidak direncanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena anak-anak putus sekolah di Kecamatan Harjamukti secara natural memang biasa terjadi mengingat kebutuhan mereka terhadap akses pekerjaan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Terutama masyarakat di beberapa daerah pinggiran kota atau desa kota (*urban fringe*) seperti Cadasngampar, Silih Asah dan Benda Kerep ini biasanya memang memiliki karakteristik yang unik. Selain itu, wilayah ini juga merupakan wilayah dengan jumlah penerima bantuan PIP terbanyak sewilayah Kecamatan Harjamukti.

Dengan membenahi pendidikan di wilayah *urban fringe* Kecamatan Harjamukti artinya, pemerintah, swasta dan masyarakat sedang membenahi kualitas sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan, hukum, politik, sosial budaya hingga yang berkaitan dengan adaptasi teknologi yang nantinya akan saling mempengaruhi satu sama lain.

Identifikasi Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kecamatan Harjamukti

Kemajuan masyarakat di Kecamatan Harjamukti di masa sekarang dan masa datang akan sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas generasi mudanya. Generasi muda yang berkualitas

dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Apalagi jika mengingat bahwa pendidikan bisa dijadikan sebagai alat investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya pembangunan di sana. Sehingga pendidikan untuk semua, tidak hanya menjadi pemero saja. Tapi memiliki makna yang jauh lebih mendalam. *Pertama*, pendidikan harusnya bisa menyasar berbagai kalangan terutama bagi generasi muda yang dijadikan sebagai tonggak perubahan. *Kedua*, semua anak, tanpa memandang perbedaan gender berhak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan. Sekalipun di antara mereka adalah anak-anak yang berasal dari kaum minoritas, berada di pelosok desa bahkan yang sudah tidak memiliki orang tua. *Ketiga*, pendidikan idealnya tidak hanya dilakukan untuk menambah wawasan tapi juga berbasis edukasi keterampilan dan penguasaan teknologi. *Keempat*, mengeliminir disparitas sosial yang terjadi baik dalam hal gender, status sosial ekonomi, wilayah geografis, dan lain sebagainya. *Kelima*, memperbaiki layanan di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas peserta didik yang dihasilkan. *Keenam*, berorientasi pada optimalisasi potensi peserta didik.

Tanpa membeda-bedakan kecakapan yang dimiliki atau dengan kata lain menumbuhkembangkan prestasi berbasis potensi.

Meskipun demikian, meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah *urban fringe* Kecamatan Harjamukti ini masih cukup sulit mengingat beberapa kendala yang terjadi. Dimana *pertama*, masyarakat masih kurang menyadari akan artinya pendidikan formal. *Kedua*, keadaan ekonomi yang rata-rata didominasi oleh kelas menengah ke bawah ini justru menuntut anak-anaknya untuk bekerja daripada sekolah. Meskipun mendapatkan dana bantuan dari PIP. *Ketiga*, usia yang semakin bertambah karena tinggal kelas. *Keempat*, doktrin pemimpin kharismatik. Anggapan bahwa belajar agama di pondok pesantren lebih penting daripada belajar ilmu umum. Sehingga mereka lebih mementingkan mondok daripada sekolah. Uniknya, ketika penulis mencoba mengkaji lebih dalam mengenai alasan mereka tidak sekolah formal. Kebanyakan dari mereka justru tidak tahu dan hanya patuh pada aturan kyai di sana yang melarang sekolah formal maupun nonformal yang sifatnya umum. *Kelima*, perundungan. Beberapa kasus anak putus sekolah yang penulis temukan di lapangan, terdapat beberapa kasus perundungan di antara teman sebaya yang

secara perlahan-lahan menyebabkan seorang anak bisa saja putus sekolah. Dalam situasi yang tidak mungkin lagi diselesaikan melalui rekonsiliasi ataupun siswa yang menjadi korban menjadi trauma, maka pihak sekolah kemudian akan menawarkan solusi kepada orang tua atau wali dengan cara membantu proses pindah ke sekolah lain atau memberikan kebebasan bagi orang tua untuk menanganinya secara mandiri. Hal ini dilakukan agar siswa tetap dapat melanjutkan proses pendidikannya.

Anak Putus Sekolah: Dilema dan Desakan Penanganan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa anak putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, doktrin pemimpin kharismatik, lingkungan serta faktor dalam diri anaknya itu sendiri karena terlibat perundungan. Khususnya terkait dengan faktor ekonomi, yang seharusnya tidak lagi dijadikan dalih yang membenarkan orang tua ataupun anak tersebut untuk putus sekolah. Sekalipun mereka memang benar-benar kesulitan secara ekonomi. Mengingat pemerintah dan dibantu oleh pihak sekolah sudah memberikan berbagai bantuan program bagi siswa kurang mampu seperti PIP (Program Indonesia Pintar), RDO (Rawan Dropp Out), BSM

(Bantuan Siswa Miskin), BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan masih banyak lainnya.

Meskipun demikian, tidak sedikit di antara anak-anak ini yang kemudian memutuskan untuk berhenti sekolah dan lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Apalagi kondisi ini semakin diperparah dengan kondisi orang tuanya yang rata-rata bekerja sebagai pemulung sampah dan atau penambang galian pasir yang tersebar di Kelurahan Argasunya, Lebakngok, Sumurwuni dan Cadasngampar. Khususnya di Benda Kerep, yang mayoritas masyarakatnya masih tradisional dengan adat istiadat yang masih kental dan meyakini bahwa belajar agama lebih penting daripada sekolah

Hal ini terjadi karena masih kentalnya adat atau budaya yang dipercaya oleh masyarakat. Bahwa belajar agama (baca: Mondok) lebih penting daripada sekolah. Meskipun pada tahun 2019, sudah terdapat kemajuan bagi masyarakat Benda Kerep untuk mengakses pendidikan, sekalipun masih banyak di antaranya yang kemudian putus sekolah di kelas 2 atau 3 sekolah dasar.

Melalui kehadiran Program Indonesia Pintar ini, masyarakat rentan miskin diharapkan tetap mengakses pendidikan untuk semua secara gratis.

Sehingga biaya operasional pendidikan terasa lebih ringan atau minimalnya, mereka tidak perlu mengkhawatirkan soal peralatan sekolah yang dibutuhkan sehari-hari.

Selain dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, Program Indonesia Pintar ini juga harusnya bisa tetap dimainkan secara aktif bagi anak-anak yang sudah putus sekolah melalui program kejar paket A, B dan C yang disesuaikan dengan jenjang sekolahnya. Apalagi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi juga bisa dilakukan secara meluas mengingat program ini melibatkan tiga kementerian sekaligus yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Tentunya dalam rangka mewujudkan harapan sekaligus juga kerja nyata bagi seluruh pihak dalam rangka menyukseskan program pendidikan.

Salah satu bentuk upaya yang digencarkan oleh pemerintah dalam rangka menyukseskan Program Indonesia Pintar khusus untuk anak-anak kejar paket adalah melalui pendidikan dan pelatihan dalam program vokasi atau PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) yang juga ditunjang dengan Program Indonesia Pintar dalam pelaksanaannya. Program-program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kebutuhan anak-anak yang

terlanjur putus sekolah agar lebih bisa mandiri dan berdaya saing.

Kegiatan belajar mengajar di vokasi terdiri dari paket A yang setara dengan sekolah dasar, paket B setara sekolah menengah pertama dan paket C yang setara dengan sekolah menengah kejuruan. Proses belajar mengajar terutama di paket C ini sendiri terbagi lagi menjadi dua yaitu PKK (Program Keahlian dan Keterampilan) Vokasi dan PKW (Program Keahlian Kewirausahaan). PKK Vokasi itu sifatnya kecakapan, biasanya terdiri dari aplikasi perkantoran dan komputer. Ujiannya nanti dilaksanakan di lembaga-lembaga terkait. Sementara itu, ujian kompetensi dilaksanakan di unit-unit kewirausahaannya.

Pusat kegiatan vokasi atau PKBM dan kejar paket di Kecamatan Harjamukti adalah di SD Ciremai. Sedangkan untuk PKBM diberikan pelatihan berdasarkan keahlian yang dibutuhkan perusahaan ataupun industri seperti pelatihan desain grafis, *microsoft office*, internet dan seterusnya. Pilihan jurusan lainnya juga disediakan selama proses pembelajaran vokasi yaitu rias pengantin, menjahit, *snack* dan *bakery*, memasak dan lain sebagainya. Dimana dalam hal ini, Dinas Pendidikan menyediakan modal yang

diperlukan di bawah koordinasi kementerian terkait.

Sama halnya dengan proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah formal, di sekolah nonformal pun melibatkan banyak hal seperti peserta didik, peserta didik, interaksi edukatif di antara keduanya, tujuan pendidikan, materi, alat dan metode, serta tempat penyelenggaraan pendidikan. Meski secara teknis, kegiatan di vokasi lebih dipersingkat lagi dan berbasis pelatihan keterampilan seperti pendidikan umum, kejuruan, profesi, maupun keagamaan. Sehingga, evaluasi di kegiatan vokasi juga dilaksanakan berbasis kebutuhan industri yang evaluatornya tidak berasal dari internal saja, tapi juga dari kalangan eksternal seperti lembaga kursus komputer dan lain sebagainya.

Peningkatan Aksesibilitas Siswa Miskin dan Pencegahan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Harjamukti

Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia

sekolah dari keluarga kurang mampu pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kartu tersebut sebagai identitas/penanda untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar dan hal ini hanya akan diperoleh apabila anak tersebut mendaftar di sekolah/madrasah, pondok pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C), lembaga pelatihan atau kursus.

Penerima KIP adalah anak usia 6 - 21 tahun yang bersekolah maupun tidak bersekolah, yang berasal dari keluarga penerima KKS atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya anak-anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan melaporkan KIP tersebut ke sekolah/madrasah untuk diusulkan sebagai penerima manfaat program tersebut.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima program agar menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa Miskin/ Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun 2015 rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia.

Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar dilaksanakan dua kali didalam satu tahun anggaran, yaitu

periode Januari-Juni Tahun 2016 untuk semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 yang dapat dicairkan mulai bulan Januari, dan periode Juli – Desember tahun 2016 untuk semester I tahun pelajaran 2016/2017 yang dapat dicairkan mulai bulan Juli. Dengan penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar dua kali dalam setahun diharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (*drop-out*) karena tidak tersedianya biaya.

Selain itu, Program Indonesia Pintar juga diberikan untuk memastikan agar siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang berada pada periode transisi (antarjenjang kelas dan jenjang pendidikan seperti dari MI/SD ke MTs/SMP atau dari MTs/SMP ke MA/SMA) dapat terus melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pencegahan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Harjamukti

Selain untuk meningkatkan akses siswa miskin untuk tetap terus menerima layanan pendidikan, Program Indonesia Pintar di Kecamatan Harjamukti juga diberikan dalam rangka mencegah anak putus sekolah yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin; pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta

Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah.

Pemerintah Kota Cirebon melalui Pemerintah Kecamatan Harjamukti telah memberikan bantuan Rawan *Drop Out* (DO). Rawan DO ini adalah bagian dari biaya personal peserta didik, yang digunakan untuk kepentingan pendidikan anak, di antaranya bisa digunakan untuk membeli seragam sekolah, buku tulis, biaya transportasi dan lain-lain. Selain itu, bagi penerima bantuan Rawan DO ini, Kepala Dinas Pendidikan mengharapkan agar pada awal tahun ajaran pihak sekolah atau operator sekolah untuk melakukan penjarangan data pada awal tahun ajaran. Keterlibatan pemerintah ini kemudian memunculkan harapan baru bagi Kecamatan Harjamukti untuk menurunkan angka putus sekolah.

Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Wilayah Urban Fringe Kecamatan Harjamukti

Secara harfiah, evaluasi yang berasal dari Bahasa Inggris, "*Evaluation*" yang bisa diartikan sebagai penilaian atau penaksiran (Anas, 2013: 1). Selain definisi tersebut, evaluasi masih memiliki beberapa pengertian lainnya. Apalagi jika dikontekskan dalam *setting* dunia

pendidikan. Evaluasi pendidikan dalam konteks ini bisa saja digambarkan sebagai suatu untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai yang menghasilkan nilai sangat valid dengan tujuan mengendalikan nilai mutu pendidikan.

Mengingat luasnya cakupan yang ada di dalam pendidikan, maka beberapa pakar evaluasi pendidikan kemudian mengklasifikasikan evaluasi pendidikan ke dalam tiga gambaran besarnya yang didasarkan pada cakupan kepentingannya, yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi program dan evaluasi sistem. Kemudian jika dirunutkan juga pada pasal 57 ayat 2, UURI No. 20 Tahun 2003, maka evaluasi perlu dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.

Evaluasi Program Indonesia Pintar di Kecamatan Harjamukti tidak hanya menasar anak-anak yang berhak menerima bantuan program. Tapi juga menindaklanjuti kasus anak-anak yang terlanjur sudah putus sekolah. Dimana mereka didorong untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya. Meskipun mereka sudah banyak yang bekerja. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan manusia daerah yang memiliki daya saing sesuai dengan penguasaan keterampilan yang

dimilikinya. Tentu saja, hal ini bisa diperoleh berdasarkan rekam jejak terhadap hasil pendidikan formal maupun nonformal yang diperolehnya. Program Indonesia Pintar yang memang sudah berjalan selama beberapa tahun sejak tahun 2016 ini sengaja dirancang untuk menyempurnakan bantuan langsung tunai yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Bagi masyarakat, bantuan ini sangat penting dan dibutuhkan. Apalagi di wilayah-wilayah seperti di Cadasngampar, Silih Asih dan Benda Kerep ini merupakan wilayah-wilayah pinggiran dalam sistem perkembangan masyarakat urban. Wilayah-wilayah ini bahkan terletak di area perbukitan, pertambangan dan pinggiran sungai yang aksesnya tertutup dari daerah lainnya.

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, penelitian evaluasi ini menggunakan model *goal free evaluation* yang memang tidak akan terlalu fokus pada tujuan program, meski tidak menutup kemungkinan jika sedikit banyak tujuan program ini bisa menjadi bekal bagi penulis untuk mengembangkan analisis terkait hasil penelitian yang dilakukan. Akan tetapi, penulis tidak akan menutup kemungkinan jika Program Indonesia Pintar ini ternyata berimbas pada tujuan-tujuan lain yang muncul selama penelitian. Mengingat, penulis hanya akan

mengkaji perihal pengaruh program terhadap anak putus sekolah di tengah masyarakat *urban fringe* di Kecamatan Harjamukti yang direpresentasikan melalui tiga wilayah terpilih yaitu Cadasngampar, Silih Asah dan Benda Kerep.

Meski Program Indonesia Pintar memang bukan satu-satunya program yang dicanangkan oleh pemerintah. Tapi munculnya beragam produk kebijakan yang prorakyat seperti ini bisa mendukung program pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menurunkan angka putus sekolah. Minimalnya, dengan munculnya program kebijakan seperti ini, masyarakat kelas menengah ke bawah memiliki akses untuk mengikuti wajardikdas. Dimana faktor ekonomi yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama yang berada di wilayah *urban fringe* ini tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka untuk putus sekolah. Bahkan selain itu, pemenuhan akses ini juga akan berimbas pada menurunnya angka putus sekolah di satu sisi dan meningkatkan angka partisipasi sekolah di sisi yang lain.

Kebutuhan operasional pendidikan yang selama ini dianggap membebani bagi orang tua siswa. Demi untuk membeli peralatan dan perlengkapan sekolah, biaya

transportasi ataupun kebutuhan mereka terkait pembelian buku-buku pembelajaran yang memadai. Setidaknya bisa sedikit dikurangi bebannya dengan pemanfaatan dana bantuan dalam program ini. Meskipun ada kemungkinan-kemungkinan di mana orang tua siswa menggunakan dana manfaat program ini untuk keperluan hidup sehari-hari lainnya.

Sementara itu, efek lainnya yang mungkin saja muncul dari diberlakukannya program ini adalah tidak terpenuhinya prasyarat untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat. Dimana dalam hal ini, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai yang bisa jadi tidak benar-benar menguraikan dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Tapi justru memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyandarkan kemampuannya pada pemerintah.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kemandirian masyarakat dalam pembangunan terutama di bidang pendidikan dinilai dari kemampuan mereka untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbasis dari, oleh dan untuk rakyat. Sehingga, program-program pendidikan yang sudah dicanangkan tidak hanya berperan sebagai umpan mentah yang diberikan untuk masyarakat. Tapi berfungsi sebagai kail untuk memberdayakan dan meningkatkan

kapasitas mereka. Terutama dalam bidang pendidikan dan imbasnya terhadap bidang lainnya atau bisa disebut juga dengan *multiplier effect*.

Faktanya, bagi sebagian masyarakat pinggiran kota seperti di Kecamatan Harjamukti yang sebagian besar didominasi oleh para pemulung. Bantuan langsung tunai seperti ini memang memberikan mereka solusi temporer, yang tentu saja manfaatnya akan sangat dirasakan secara langsung oleh mereka. Akan tetapi, efek keberlanjutan program yang seharusnya bisa memberdayakan masyarakat ini kemudian menjadi pekerjaan rumah yang juga harus dipecahkan.

Evaluasi PIP Terkait Anak Putus Sekolah di Wilayah *Urban Fringe* Kecamatan Harjamukti

Masyarakat di pinggiran kota (*urban fringe*) yang tersebar di wilayah Cadasngampar, Silih Asih dan Benda Kerep pada dasarnya akan selalu dihadapkan dengan permasalahan sosial budaya yang ada di sana. Kondisi ini diperparah lagi dengan rusaknya kondisi lingkungan, polusi, kemiskinan, dan berbagai masalah sosial lainnya termasuk rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Apalagi jika mengingat bahwa Kecamatan Harjamukti menjadi sasaran pengembangan Metropolitan Cirebon Raya (MCR) yang memiliki masalah yang

berkaitan dengan gelandangan, anak-anak terlantar, pengemis, sampah, lalu lintas, dan masalah sosial budaya lainnya.

Wilayah *urban fringe* atau bisa saja didefinisikan sebagai suatu daerah pinggiran kota yang mempunyai ciri campuran antara sifat kehidupan kota dan desa. Wilayah ini secara alami berkembang ke arah luar hingga wilayah-wilayah perbatasan. Karena pemekaran yang terjadi dan polanya mengikuti prasarana transportasi yang ada. Dimana pola pemukimannya juga masih sangat tradisional dengan cara mengikuti bentuk dan aliran sungai.

Dalam ruang lingkup Kecamatan Harjamukti, wilayah *urbanfringe* ini memiliki karakteristik mendasar yaitu *pertama*, awalnya daerah ini merupakan daerah pedesaan yang menjadi sasaran pengembangan kota sekaligus juga menjadi lahan spekulasi bagi para pengembang tanah. *Kedua*, wilayah ini merupakan wilayah dengan basis penduduk perkotaan yang memiliki karakter sosial perkotaan. Selain itu ciri khas yang paling mudah untuk dilihat pada suatu wilayah *urban fringe* adalah semakin jauh lokasinya dari pusat kota, semakin baru perubahannya dan semakin berkurang padat penduduknya.

Secara normatif, tujuan PIP ini diberikan kepada keluarga miskin, rentan

miskin ataupun prioritas untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal seperti paket A hingga C serta kursus terstandar.

Sebagaimana prinsip dasar terkait prioritas penerima Program Indonesia Pintar, di Kecamatan Harjamukti terutama di wilayah Cadasngampar, pihak pengelola bantuan di sekolah mengajukan semua nama siswa baru yang ada di sekolah. Tanpa membatasi siapa-siapa saja yang berhak mendaftarkan diri. Mengingat proses seleksi dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Karena itu, pihak pengelola yang ada di sekolah cenderung menghindari kemungkinan munculnya protes dari masyarakat yang merasa jauh lebih berhak untuk mendaftar dibandingkan pihak lainnya. Meskipun dalam hal ini pihak sekolah sudah melakukan survei lapangan dan mengecek kebenaran informasi terkait sasaran penerima yang lebih diprioritaskan.

Mayoritas masyarakat pinggiran Kecamatan Harjamukti terutama di tiga wilayah ini memiliki mata pencaharian sebagai pemulung sampah, ataupun pedagang kecil. Keterbatasan hidup yang jauh dari mapan, bagi sebagian orang di sana lebih memilih untuk mendorong anaknya untuk bekerja daripada sekolah.

Sehingga banyak di antara mereka yang pada akhirnya putus sekolah lalu bekerja.

Padahal, meski mungkin bantuan Program Indonesia Pintar ini tidak bisa membantu secara penuh untuk mencukupi kebutuhan hidup peserta didik. Akan tetapi, besaran dana yang dikucurkan pemerintah tentu bisa meringankan beban bagi orang tua siswa yang mayoritas bekerja sebagai pemulung sampah di wilayah pinggiran kota di Kecamatan Harjamukti. Selain itu, program ini diharapkan juga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antara siswa kaya dan miskin di sekolah. Agar mereka tetap bisa mengakses pendidikan yang sama.

Dana yang diberikan sebagai bentuk manfaat program dari pemerintah ini besarnya disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Bagi siswa sekolah dasar dan sederajat, dana yang dialokasikan adalah Rp. 450.000/tahun untuk setiap siswa. Bagi siswa sekolah menengah pertama dan sederajat, dana yang dialokasikan adalah Rp. 750.000/tahun untuk setiap siswa. Bagi siswa sekolah menengah atas dan sederajat, dana yang dialokasikan adalah senilai Rp. 1.000.000/tahun untuk setiap siswa. Bahkan berdasarkan data yang penulis dapatkan, sejak dimulainya PIP tahun 2014 sampai Desember 2018, jumlah dana yang tersalurkan kepada

seluruh siswa miskin adalah sebesar Rp. 42.873.024.725.000.

Dana yang diterima oleh siswa dan walinya ini bisa dipakai untuk membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku dan biaya transportasi maupun biaya tambahan praktik atau ujian kompetensi bagi peserta didik. Mengingat belum adanya sistem pengawasan yang ketat, akan sangat memungkinkan bagi siswa ataupun walinya untuk memanfaatkan dana bantuan ini untuk keperluan yang lain, selain keperluan operasional sekolah. Jika ini benar-benar terjadi, maka program ini memiliki celah untuk terjadinya inefisiensi dan kurang efektif dalam mekanisme pengawasannya.

Evaluasi PIP Terkait Mekanisme, Prosedur dan Pemanfaatan

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan sekolah/SKB/ PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya.

Mekanisme pendaftaran dan pengunduhan bantuan program dimulai ketika *pertama*, siswa ataupun wali

melaporkan nomor KPS/KKS/KIP keluarganya ke sekolah. Artinya, keluarga dengan syarat dan ketentuan berlaku yang berhak menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diterbitkan oleh pemerintah melalui kementerian sosial dalam rangka percepatan dan perluasan sosial. Kartu ini diperuntukan bagi masyarakat miskin yang menerima subsidi beras untuk mendapatkan bantuan pendidikan bagi siswa dan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Program yang diberlakukan sejak munculnya publikasi kebijakan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Juni 2013 terkait pelaksanaan pemberian KPS dan pengaduan masyarakat ini memang sudah tidak berlaku lagi semenjak dirilisnya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang difungsikan untuk menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dalam bentuk pemberian bantuan sosial berupa simpanan keluarga sejahtera ini menjadi referensi penting untuk mempertimbangkan pemilihan calon penerima bantuan program. Bagi siswa yang keluarganya memiliki KPS, otomatis dia akan terpilih sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar.

Dalam KPS, kepala keluarga berhak menerima penyaluran uang tunai sebesar

Rp. 200.000 rupiah setiap bulannya selama delapan bulan selanjutnya. Selain itu, bagi siswa yang keluarganya tidak memiliki KPS ini tetap mungkin untuk dipilih sebagai penerima bantuan PIP.

Langkah *kedua* dalam mekanisme pengunduhan dana PIP adalah sekolah memasukkan nomor KPS/KKS/KIP siswa ke Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Sementara itu, SKB/PKBM/Lembaga kursus atau pelatihan mengusulkan peserta didik melalui format usulan yang disesuaikan. Terkait di wilayah Kecamatan Harjamukti sendiri, baik di lingkungan pendidikan formal ataupun nonformal, pihak sekolah ataupun pengelola mengajukan semua data siswa. Tanpa melakukan pengecekan lebih jauh. Mengingat hal ini beresiko pada munculnya konflik kepentingan. Dimana masyarakat yang merasa jauh lebih berhak akan melayangkan protes kepada pihak sekolah ataupun pengelola.

Sedikit berbeda dengan proses pengelolaan dana bantuan PIP di sekolah formal, di lembaga nonformal, pihak pengelola bantuan Program Indonesia Pintar ini biasanya dituntut untuk melakukan beberapa percepatan pengunduhan program.

Terkait mandegnya penyerapan dana bantuan program yang terjadi di lembaga nonformal Kecamatan

Harjamukti, pihak pengelola harus lebih proaktif untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan ini dengan para siswa di sana. Apalagi di lapangan, kebanyakan siswa sulit dihubungi dan hanya muncul ketika akan dilaksanakan ujian kelulusan. Hal ini terjadi karena sebagian besar siswa nonformal sudah sibuk bekerja.

Dana yang sudah dicairkan secara kolektif harus segera diberikan kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan, dan pelaporan pemberian dana pencairan kolektif dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pencairan. Laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk SD/SMP/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal penyelenggara Paket A dan B), atau kepada dinas pendidikan provinsi (untuk SMA/SMK/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal penyelenggara Paket C dan pendidikan kursus, dengan menyerahkan tanda terima pendistribusian dana pengambilan kolektif (format terlampir).

Bagi penerima PIP dari lembaga Kursus dan Pelatihan, proses pencairan dilakukan secara kolektif oleh pimpinan lembaga dengan memenuhi persyaratan pencairan kolektif mengingat durasi

pembelajaran relatif singkat. Pencairan/pengambilan dana PIP langsung oleh peserta didik atau secara kolektif di bank/lembaga penyalur, harus dengan kondisi, *pertama*, tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun. *Kedua*, saldo minimal rekening tabungan adalah Rp 0,00. *Ketiga*, tidak dikenakan biaya administrasi perbankan

Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan seperti, *pertama*, membeli buku dan alat tulis. *Kedua*, membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll). *Ketiga*, membiayai transportasi peserta didik ke sekolah. *Keempat*, uang saku peserta didik. *Kelima*, biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal. Sementara itu, bagi peserta didik nonformal, ada biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Analisis Dampak Program Indonesia Pintar dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Harjamukti

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan ada beberapa hal yang peneliti temukan di tempat penelitian. *Pertama*, daerah-daerah di Kecamatan Harjamukti memang masih berpotensi memiliki anak putus sekolah terutama wilayah-wilayah terluar dan pinggiran. Bahkan wilayah-wilayah yang berpotensi memiliki anak putus sekolah ada di daerah pegunungan dan pertambangan. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan bagi anak-anak ini mengalami misionisasi terhadap pendidikan dan lebih mementingkan untuk mencari uang. Meskipun mereka masih berada di usia sekolah.

Kedua, secara institusional, Program Indonesia Pintar langsung dikelola oleh pemerintah pusat, berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait usulan penerima. Akan tetapi secara teknis baik seleksi, pencairan maupun pemanfaatan semua langsung diurus oleh pemerintah pusat dan diterima langsung oleh si penerima bantuan, melalui jasa perbankan yang ditunjuk.

Ketiga, Dinas Pendidikan maupun koordinator kecamatan tidak mengetahui secara detail dan riil mengenai jumlah usulan dan penerima manfaat program.

Keempat, data pokok pendidikan di tiap sekolah menjadi tumpuan sekaligus juga pendukung penting bagi proses seleksi program. Dimana proses seleksi administrasi hingga pencairan terjadi secara sentralistik antara pemerintah pusat dengan penerima bantuan. Sekolah dalam hal ini hanya berperan sebagai pihak yang mengajukan nama-nama penerima manfaat program. Hal ini akan meningkatkan efektivitas prosedural di satu sisi, dan munculnya kemungkinan tidak tepatnya sasaran yang berhak menerima bantuan program di sisi yang lain.

Kelima, Kecamatan Harjamukti dan mungkin di banyak wilayah lainnya sebenarnya tidak perlu mencemaskan soal potensi anak-anak yang putus sekolah mengingat pemerintah dalam hal ini sebagai *supporting system* memberikan banyak program bantuan baik yang bersifat langsung tunai ataupun beasiswa. Khusus untuk pendidikan nonformal pemerintah memberikan bantuan berupa PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) kepada anak yang mengalami putus sekolah di usia sekolah. PKBM merupakan wadah /fasilitator pertemuan antara kebutuhan dan sumber daya belajar, fasilitator pertemuan antara masyarakat yang berkebutuhan belajar dengan sumber daya belajar sehingga

terjadi sebanyak mungkin peristiwa belajar.

Kecamatan Harjamukti memiliki empat PKBM yaitu PKBM Handayani, PKBM Namira, PKBM Sunan Kalijaga dan PKBM Sekar Sari Dahlia. Adapun program belajar yang disediakan PKBM di antaranya pendidikan kesetaraan paket A, B, C, dan kursus serta pelatihan.

Bantuan program dinilai kurang tepat sasaran sekalipun pihak sekolah dalam hal ini mengajukan semua data siswa tanpa melalui proses seleksi lagi di sekolah. Siswa yang masuk kategori ekonomi menengah ke atas mendapatkan bantuan di satu sisi, sementara itu siswa yang jauh lebih berhak mendapatkan bantuan program justru tidak mendapatkannya di sisi yang lain. Akibatnya, orang tua dari siswa yang berhak menerima merasa keberatan dan memperdebatkan kebijakan yang sudah diputuskan tersebut ke pihak sekolah. Meskipun pihak sekolah dalam hal ini tidak memiliki otoritas apapun untuk mengubah kebijakan. Mengingat pengelolaan administratif yang dikelola oleh pihak sekolah langsung dikirim ke pemerintah pusat melalui jalur Dapodik *online*. Sementara terkait seleksi, penetapan penerima bantuan, sampai dengan pengunduhan terjadi secara sentralistik dari pemerintah pusat

langsung kepada si penerima bantuan program.

KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi banyaknya anak putus sekolah di Kecamatan Harjamukti berasal dari internal dan eksternal peserta didik, antara lain ekonomi, doktrin pemimpin kharismatik, usia, perundungan serta kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya pendidikan. Melihat realitasnya, pihak sekolah dan instansi terkait secara aktif didorong untuk mengikuti program pendidikan, termasuk PIP, PKH dan lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara menangani anak yang putus sekolah berupa vokasi (PKBM) dan kejar paket melalui program percepatan PIP. Bantuan PIP berlaku bagi pendidikan formal maupun nonformal mengingat perbedaan karakteristik pendidikan yang khas di antara keduanya. Dimana sasaran penerima bantuan di lembaga pendidikan nonformal mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Sementara untuk sekolah lanjutan atas dan sederajat dikelola oleh pemerintahan provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. Jabar, Cepi Safrudin Abdul. (2009). *Evaluasi Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Gunawan, Imam. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, cet 5. Jakarta: Bumi Aksara.

Lela (2020). Wawancara tentang Pendidikan Nonformal Kecamatan Harjamukti.

M. Musiyam. (1994). *Beberapa Implikasi Perkembangan Kota pada Rural Urban Fringe*. Jurnal Forum Geografi No. 14 dan 15 Edisi 9, Desember.

Megawati, I. (2016). Efektivitas Pelatihan Kecakapan Hidup Modifikasi Kerudung Dalam Meningkatkan Kompetensi Kewirausahaan Di Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah*, Vol 1, No 1, Hlm 74-87.

Moleong, J. Lexy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nata, Abudin. (1997). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Noni Huriati. (2008). *Perkembangan Daerah Pinggiran Kota Yogyakarta tahun 1992-2006*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.

Prihanto, Teguh. (2010). *Perubahan Spasial dan Sosial Budaya sebagai Dampak Megaurban di Daerah Pinggiran Kota Semarang*. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, 12 (1), Semarang: Universitas Negeri Semarang. 134.

Rohaeni, N. E., Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*, Vol. 2, No.1, 193-204

Rusydi Ananda dan Tien Rafida.(2017). *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*.Medan: Perdana Publishing.